

# **ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA KOTA PONTIANAK DALAM PENGUATAN KOMITMEN KEBANGSAAN**

**Dada Suhaida**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
IKIP-PGRI Pontianak

## ***ABSTRACT***

*Political orientation is perception, attitude pattern, and political culture of somebody or society group to various political problem and political event and also forming structure and process the political activity of society as well as governance. The political orientation concerning knowledge storey; level, feeling, involvement, and repellent, and also assessment to obyek of power of order and authority in political system and governance which underway. Since political reform of be taken out in the year 1998, political system of Indonesia have opened the space for all citizens Indonesia to join in have politics, inclusive of for ethnical clan citizen of Tionghoa. Born the nya of Number Law 12 Year 2006, About Civic of Republic Of Indonesia and Number Law 40 Year 2008, about Abolition of Race Discrimination and Ethnical is represent the reflection from governmental comitmen to give the protection, certainty, and equality domicile in law at all of citizen to live to free from the race discrimination and ethnical.*

**Keywords:** *Political Orientation, Ethnical Tionghoa, Nasionalism*

## **ABSTRAK**

Orientasi politik adalah persepsi, pola sikap, budaya dan politik seseorang atau kelompok masyarakat untuk berbagai masalah politik dan peristiwa politik dan juga membentuk struktur dan proses kegiatan politik masyarakat serta tata kelola pemerintahan. Orientasi politik tentang tingkat pengetahuan, perasaan, keterlibatan, dan penolakan, dan juga penilaian obyek kekuasaan tata tertib dan otoritas dalam sistem politik dan tata kelola yang berlangsung. Sejak reformasi politik pada tahun 1998, sistem politik indonesia telah membuka ruang bagi semua warganegara indonesia untuk bergabung dalam kancah politik, tanpa terkecuali warga etnis tionghoa. Lahirnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008, tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis adalah mewakili refleksi dari komitmen pemerintah untuk memberikan

perlindungan , kepastian, dan kesetaraan pada semua warganegara untuk mempunyai tempat dan kedudukan di mata hukum untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis.

**Kata Kunci:** Orientasi Politik, Etnis Tionghoa, Nasionalisme

## **PENDAHULUAN**

Meskipun tidak ada beda, setiap warganegara memiliki hak yang sama dalam kancah politik dan dijamin oleh undang-undang. Indonesia memiliki banyak etnis, satu di antaranya etnis Tionghoa. Etnis ini ada sekitar 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia dan sebelum Indonesia merdeka mereka telah ada. Berbagai referensi menyebutkan leluhur etnis Tionghoa datang ke Indonesia salah satu faktor penyebabnya, adalah ekonomi dan politik. Mereka ada yang datang sebagai pedagang, ada yang datang untuk jadi kuli kontrak, ada yang datang sebagai pelarian politik. Terus berkembang dan menyatu dengan rakyat Indonesia dan bahkan sejarah mencatat etnis Tionghoa pernah memberontak terhadap pemerintahan VOC (tahun 1740) di Batavia (Jakarta).

Secara umum etnis Tionghoa di Indonesia memiliki peranan besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Memang peran itu selalu berbeda-beda dari waktu ke waktu, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Sebelum Perang Dunia II, orientasi politik etnis Tionghoa menganggap dirinya hanya sebagai penduduk tetapi sementara Hindia Belanda (Hwa Chiao) menganggap etnis Tionghoa sebagai *Nederlandsch Onderdaan* (Kaula negara Belanda). Setelah pemerintahan Hindia Belanda takluk dan Jepang berkuasa banyak mereka yang ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah penjajah Jepang. Setelah Indonesia merdeka, banyak orang Tionghoa menjadi warganegara Indonesia. Pemimpin etnis Tionghoa turut berpartisipasi dalam kancah politik di Negara Republik Indonesia dengan membentuk berbagai macam organisasi politik untuk melindungi kepentingan mereka, yakni seperti Chung Hwa Hwee, tahun 1948, berdiri Persatuan Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI), pada tahun 1954, terbentuk Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Badan ini memperjuangkan persamaan hak semua rakyat Indonesia, termasuk etnis Tionghoa. Sebenarnya etnis Tionghoa di Indonesia telah dimulai secara nyata ketika Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1926, walaupun warga Tionghoa hanya dapat menjadi pengamat. Kelompok peranakan Tionghoa mendukung Indonesia merdeka, membentuk Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada 1930. Ketika orde lama berakhir dan orde baru berkuasa politik etnis Tionghoa tidak muncul di permukaan, mereka lebih dominan di bidang ekonomi di Indonesia, seakan tabu untuk menggeluti dunia politik sampai akhir kebuntuan itu pecah pada 14 Mei 1998 ketika kerusuhan melanda Jakarta.

Setelah orde baru runtuh, pemilu 1999 membawa fenomena berupa orientasi politik etnis Tionghoa. Tahapan sebelum pemilu, terbentuk beberapa partai baru yang secara terbuka menyatakan akan memperjuangkan aspirasi etnis Tionghoa.

Setelah pemilu 1999, iklim politik bagi etnis Tionghoa dalam politik lebih kondusif, berlanjut pada pemilu 2004, ketika pada pemilu legislatif, setidaknya lebih dari seratus calon legislatif yang berasal dari etnis Tionghoa tersebar di beberapa partai politik. Pemilu 2004, partisipasi etnis Tionghoa semakin dinamis dan terbuka. Prediksi pemilu 2009 ini, partisipasi politik etnis Tionghoa akan lebih meningkat berdasarkan hasil pemilu 1999 dan 2004. Partai politik berlomba-lomba “menjual” ke publik untuk dapat meraih suara dari masyarakat etnis Tionghoa. Sementara masyarakat etnis Tionghoa lebih suka memilih partai politik yang memiliki calon-calon dari multi-etnis. Dengan masuk ke dunia politik secara aktif, etnis Tionghoa diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada negara Indonesia.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2002, tentang Penetapan Tahun Baru Imlek, sebagaimana tahun baru Imlek telah diakui sebagai salah satu hari besar nasional, bahkan sejak pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, warga Tionghoa memperoleh hak-hak yang sama dengan warganegara Indonesia lainnya. Namun, di dalam ruang demokrasi yang ada sekarang ini masih ada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Tionghoa, salah satunya adalah keterlibatan mereka di kancah politik. Beredar berbagai hipotesis tentang bentuk partisipasi politik kelompok masyarakat ini setelah zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, dipaksa agar selalu menjauhi politik, ada juga yang berpendapat bahwa etnis Tionghoa di Indonesia terutama yang bergerak di bidang bisnis dan perdagangan masih ingin memihak ke partai besar dan berkuasa, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), sementara pendapat lain mengatakan etnis Tionghoa memilih partai yang terbuka yang menjanjikan keberagaman. Ada juga keinginan sebagian etnis Tionghoa di Indonesia untuk membangun kekuatan politik sendiri, tetapi ada juga yang menganggap mereka apatis terhadap politik. Keapatisan ini dibuktikan di dalam lingkungan administrasi pemerintahan masih terdapat pemberlakuan diskriminatif terhadap komunitas warganegara Indonesia (WNI) Cina/Tionghoa, dalam kenyataannya memang pemerintah kota tidak memberlakukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), namun masih banyak oknum yang mencari keuntungan dari hal tersebut (*Jawa Pos*, 16/06/04).

Berkaitan dengan uraian tersebut, jika selama pemilihan umum 1999, komunitas etnis Tionghoa masih tampak malu dan agak canggung dalam berpolitik, namun di dalam pemilu 2004, komunitas etnis Tionghoa terlihat semakin dinamis dan terbuka. Sebutan “ekonomi” dan “apolitis” adalah dua stigma populer yang sudah melekat bagi etnis Tionghoa, persepsi mayoritas elite politik Indonesia tampaknya masih berkuat di situ, karena menilai partisipasi warga etnis Tionghoa sebatas keuntungan ekonomis saja. Persepsi ini merupakan buah dari asumsi yang tidak mendasar bahwa komunitas warga etnis Tionghoa yang hanya 2% dari populasi menguasai 70% perekonomian nasional. Citra kekuatan ekonomi komunitas etnis Tionghoa memang sudah ada sejauh sejarah kolonial, tetapi label 2% dan 70%

menjadi kelihatan di akhir tahun 1990-an. Beberapa publikasi media sepanjang pemilu legislatif dan pemilihan Presiden 2004, mencatat beberapa perkembangan selama pemilu legislatif, sejumlah media mencatat setidaknya 150 calon legeslatif Tionghoa, meskipun pada akhirnya hanya sebagian kecil yang berhasil mendapatkan kursi. Di berbagai daerah muncul berbagai kreasi partisipasi politik yang dulu terasa minim sekali, mulai dari peningkatan keanggotaan partai politik, inisiatif debat atau diskusi politik oleh asosiasi Tionghoa, kampanye partai politik, sampai sosialisasi proses pemilu.

Namun setelah runtuhnya rezim orde baru lebih dari enam tahun reformasi, argumen tersebut lama-lama telah luntur. Etnis Tionghoa diharapkan tidak lagi bersembunyi dibalik argumen tersebut. Roda demokratisasi di Indonesia sedang berputar, pilihan harus dibuat dan tindakan harus diambil untuk memaknai eksistensi warga etnis Tionghoa di Indonesia. Sejak reformasi politik digulirkan tahun 1998, sistem politik Indonesia telah membuka ruang bagi seluruh warganegara Indonesia untuk ikut serta berpolitik, dan tentunya juga bagi warganegara keturunan etnis Tionghoa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan pencerminan dari komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan didalam hukum pada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis.

Bagi warga etnis Tionghoa perubahan atmosfir politik dari otoritarian ke demokrasi sangat memberikan kebebasan kepada warganegara untuk mengekspresikan gagasan, hak, dan kepentingan politik melalui kebijakan yang bersifat otoritatif, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, merupakan sebuah berkah yang patut disyukuri, diperjuangkan serta dipertahankan. Inilah saatnya untuk melibatkan diri dalam aktivitas politik mulai dari ranah lokal maupun nasional, melalui sarana partai politik dan pemilihan umum untuk menunjukkan rasa komitmen kebangsaan yang tinggi sebagai warganegara Indonesia. Aktivitas politik etnis Tionghoa merupakan cerminan dari kesadaran berbangsa dan bernegara dimana etnis Tionghoa membuktikan tidak hanya dalam hal pengurusan identitas kewarganegaraan yang sifatnya pasif tetapi juga dalam bidang pemerintahan, khususnya keterlibatan mereka dalam partai politik. Sebagaimana orientasi politik warganegara etnis Tionghoa pada masa pemerintahan orde baru terhadap politik lebih cenderung apatis, karena pengakuan terhadap eksistensi mereka sebagai warganegara Indonesia masih belum jelas. Di sisi lain, sebelum bergulirnya reformasi mereka cenderung takut (*underpressure*) apabila melibatkan diri dalam kancah berpolitik karena keterkaitan sejarah hubungan RRC dan RI saat ideologi komunis berkembang di Indonesia.

Sebagaimana menurut Almond (1966:16), adapun orientasi politik individu itu memiliki sejumlah komponen yakni;

- a. Orientasi kognitif, meliputi aspek pengetahuan, keyakinan

- b. Orientasi afektif, meliputi aspek perasaan terkait, keterlibatan, penolakan, dan sejenisnya tentang obyek politik.
- c. Orientasi evaluasi, meliputi aspek penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai terhadap obyek kejadian-kejadian politik.

Selanjutnya Almond dan Verba (2009:16), mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warganegara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan diantara bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan bahwa warganegara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Warganegara etnis Tionghoa mengetahui dan menyadari bahwa pengekangan terhadap kebebasan menentukan haluan politik (*political right*) adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Di sisi haluan orientasi politik terhadap komitmen kebangsaan adalah suatu kewajiban sekaligus hak yang tidak dapat dibatasi oleh agama, geografis, status sosial, status ekonomi, ideologi politik, dan etnisitas.

Masalah isu kebangsaan menjadi hal yang menarik ketika digali lebih dalam. Ketika orde baru jatuh dan mewariskan konflik muncul komunalisme masyarakat berdasarkan agama dan etnis. Rasa sebagai 'orang Indonesia' berkurang. Ini terjadi hampir disemua suku di Indonesia bukan hanya etnis Tionghoa saja, terutama di pulau-pulau terbelakang dan di daerah perbatasan. Diskriminasi, ditenggarai menjadi salah satu penyebabnya. Yang lebih mengkhawatirkan bahwa isu identitas kebangsaan melanda hampir di semua wilayah di Indonesia. Karenanya, Budi S. Tanuwibowo, Sekjen Perhimpunan INTI menghimbau agar kita kembali ke cita-cita awal para pendiri bangsa bahwa Indonesia didirikan bukan atas dasar etnisitas ataupun agama. Jadi kini jangan lagi bicara kepentingan etnis Tionghoa, Jawa, dan lain sebagainya tapi untuk menjadi bangsa yang kokoh kita harus bisa menghargai kebhinekaan sebagai sebuah keniscayaan.

Demikian dalam hal ini, bahwa kini saatnya bagi etnis Tionghoa berperan lebih banyak di berbagai bidang, keluar dari kenyamanan, untuk membantu mendirikan bangsa ini dan mengentaskan masalah korupsi sebagai akar dari semua masalah di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti adalah fenomena kehidupan sosial masyarakat maka pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif (Creswell:1998). Peneliti membuat gambaran kompleks yang bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan dan partisipan secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi alamiah. Subjek yang diteliti adalah masyarakat etnis Tionghoa Kota

Pontianak Kalimantan Barat. Terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh Politik.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kota Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan dapat disimpulkan cukup tinggi dimana, hal ini di-tunjukkan dari aspek kognitif, afektif, dan evaluatifnya yang semakin meningkat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Orientasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Kota Pontianak Dalam Penguatan Komitmen Kebangsaan**

No.	Hasil Penelitian
1	Orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa cukup tinggi ini di-tampilkan dari orientasi kognitif: yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.
2	Orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa cukup tinggi ini di-tampilkan dari orientasi apektif: yakni perasaan terhadap sistem politik, peranan, keberadaan aktor dan penampilannya
3	Orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa sudah cukup tinggi ini di-tampilkan dari aspek evaluatif: yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Dari tabel 1.1 di atas terungkap bahwa orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kota Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan dapat dikatakan cukup tinggi, dimana dari ketiga aspek tersebut terdapat peningkatan dan orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa tersebut dapat diklarifikasikan orientasi yang bersifat positif yaitu: dimana orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik. Dimana orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat.

Nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakikatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik (Soemitro 1999:27), atau peradapan masyarakat (Verba, Sholozman, Bradi, 1995). Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik. Manifestasi dari apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh manusia biasanya akan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Dalam konteks perilaku politik, hal yang dipikirkan dan diinginkan tersebut berkaitan erat dengan orientasi politik yakni kekuasaan dimana kekuasaan itu diperolehnya dengan suatu proses pemilihan. Walaupun secara teoritis, penjelasan tentang perilaku yang muncul dari perbedaan sikap sudah terlihat jelas, mamun sikap bukan sesuatu yang bisa begitu saja terjadi. Sikap terbentuk dari proses sosialisasi yang panjang, mulai manusia baru lahir sampai

dewasa. Melalui proses sosialisasi inilah kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang berupa simpati.

Hasil penelitian dari strategi politik masyarakat etnis Tionghoa Kota Pontianak dalam melakukan aktivitas politiknya, tergambar pada tabel di bawah berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Strategi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Kota Pontianak dalam Melakukan Aktivitas Politik**

No	Hasil Penelitian	
1	Strategi politik masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak sudah cukup afektif:	<p style="text-align: center;">Langkah-langkah Strategi Yang Diterapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penentuan misi,</li> <li>2. Melakukan analisa &amp; penilaian situasi,</li> <li>3. Melakukan perumusan sub-Strategi,</li> <li>4. Melakukan perumusan tujuan,</li> <li>5. Menciptakan citra target,</li> <li>6. Melakukan pencapaian sasaran target eksternal dan internal (kelompok target),</li> <li>7. Melakukan pesan kelompok target,</li> <li>8. Merumuskan cara untuk mencapai sasaran di dalam kelompok target,</li> <li>9. Rencana waktu dan aksi,</li> <li>10. Selalu melakukan kontrol terhadap strategi.</li> </ol>

Tergambar tabel 1.2 di atas terungkap bahwa langkah-langkah strategi masyarakat etnis Tionghoa dalam melakukan aktivitas politiknya berjalan dengan efektif. Dimana hal tersebut ditampilkan dari beberapa kemenangan yang di peroleh aktor/elite politik etnis Tionghoa yang menang dalam pemilu tahun 2008-2009, dan tidak dipungkiri lagi semakin meningkatnya aktor/elite politik etnis Tionghoa yang duduk pada lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Pontianak. Kartino Kartono (1989), berpandangan kepada aktor/elite politik di dalam menerapkan strategi di dalam aktivitas politik sangat penting untuk lebih memahami gejala-gejala politik, orang bisa melihat efek dan pengaruh serta akibat dalam masyarakat luas. Pengaruh-pengaruh politik itu tidak dapat diraba atau diukur secara eksak, namun kejadian tersebut jelas menggejala di tengah masyarakat, dan bisa dirasakan kebaikan atau keburukannya.

Hasil penelitian berkaitan dengan strategi politik masyarakat etnis Tionghoa Kota Pontianak dalam melakukan aktivitas politiknya, tergambar pada tabel dibawah berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Peran Aktor Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Kota Pontianak dalam Melakukan Aktivitas Politik**

No	Hasil Penelitian	
1	Paran aktor politik masyarakat etnis tionghoa di Kota Pontianak dalam melakukan aktivitas politik belum berjalan dengan optimal	<p style="text-align: center;"><b>Indikator-Indikator Pengukur Kinerja Aktor Politik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwakilan dari aktor politik dalam hal ini lembaga DPRD dalam menjalankan tugasnya belum benar-benar bisa menjadi wakil bagi konstituennya,</li> <li>2. Belum sepenuhnya memperjuangkan kepentingan rakyat dalam setiap produk politik yang dihasilkan</li> <li>3. Belum transparansinya lembaga wakil rakyat terhadap publik dalam setiap proses hingga keputusan politik yang mereka buat ( indikator tranparansi).</li> <li>4. Indikator akuntabilitas, dimana setiap kerja lembaga legislatif harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. dalam menjalankan tiga fungsinya, yakni, pengawasan, pembuatan Perda dan pembuatan anggaran idealnya semuanya harus akuntabel.</li> <li>5. Indikator efektifitas, hendaknya Institusi DPRD harus efektif dalam melaksanakan semua tugas. Misalkan dalam fungsi pengawasan, seberapa efektif Dewan mampu mengontrol penyimpangan yang terjadi.</li> </ol>

Tergambar tabel 1.3 di atas, jelas terungkap bahwa peran aktor politik masyarakat etnis Tionghoa dalam melakukan aktivitas politik di Kota Pontianak dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal, hal ini ditandainya dari beberapa indikator aktivitas aktor politik yang masih lemah, beberapa faktor bisa menjadi penyebab mengapa kinerja aktor politik masih belum optimal dalam hal ini DPRD Kota Pontianak dapat dikatakan masih lemah dalam melaksanakan kerjanya. Sedangkan faktor yang mendorong tumbuh dan meluasnya tingkat orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kota Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan, dijabarkan hasil penelitian pada tabel berikut ini:

**Tabel. 1.4**  
**Faktor Yang Mendorong Tumbuh dan Meluasnya Tingkat Orientasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Pontianak Dalam Penguatan Komitmen Kebangsaan**

No	Hasil Penelitian		
		Faktor Pendorong Tumbuhnya Tingkat Orientasi Politik	Faktor Pendorong Meluasnya Tingkat Orientasi Politik Etnis Tionghoa
1	Faktor yang mendorong tumbuh dan meluasnya tingkat orientasi politik etnis tionghoa di Kota Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perasaan naluriah yang di wariskan oleh leluhur.</li> <li>2. Merasa sudah sebagai bagian dari anak bangsa yaitu bangsa Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor runtuhnya rezim pemerintahan Mas orde baru.</li> <li>2. Berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006, tentang Kewarga negaraan.</li> </ol>

Dari tabel 1.4 di atas terungkap bahwa faktor yang mendorong tumbuh dan meluasnya tingkat orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan, berdasarkan dari hasil deskriptif penelitian terungkap bahwa faktor yang mendorong tumbuh dan meluasnya tingkat orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa dalam penguatan komitmen kebangsaan adalah faktor naluriah yang turun temurun dari leluhur dan sudah ada sejak jaman Hindia Belanda, hal ini ditampilkan dari beberapa keterangan dari informan di lapangan, yang dideskripsikan bahwa sejarah tumbuh dan meluasnya tingkat orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa sudah ada sejak abad ke-18 sebelum perang dunia ke II, dan setelah runtuhnya rezim orde baru pada masa pemerintahan Peresiden Soeharto barulah dapat dikatakan tingkat orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa semakin meluas di Indonesia dan geliat-geliat aktivitas orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa ini dipertegas dan diperkuat lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan dimana salah satu isi dari Undang-Undang tersebut telah memperjelas bahwa konsep bangsa Indonesia asli yang sesungguhnya yang tidak berdiri sendiri melainkan berdasarkan atas kesamaan ras, etnik (suku bangsa), bahasa, golongan, maupun agama, yang sudah diakui di dalam UUD 45 maupun Undang-Undang Kewarganegaraan bahwa jati diri bangsa Indonesia beranjak dari sejarah, rasa senasib dan sepenanggungan yang sudah ada sejak lama tumbuh dari masyarakat Indonesia yang plural dan multikultur.

Sebagaimana yang disampaikan Suryadinata (2002), dimana Suryadinata menyatakan bahwa peninjauan sejarah pemikiran politik minoritas Tionghoa di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi orang Tionghoa tentang posisi mereka di Indonesia-pun berubah-ubah sesuai dengan perubahan masyarakat Tionghoa dan tuntutan zaman.

## REKOMENDASI

Merujuk pada hasil penelitian, penulis merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa dalam penguatan komitmen kabangsaan terhadap pengembangan pendidikan kewarganegaraan.

Rekomendasi ini disampaikan kepada berbagai pihak terkait yang memiliki kontribusi kuat terhadap pendidikan kewarganegaraan khususnya bagi pemerintah eksekutif maupun legislatif dan bagi lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya.

1. Kepada pemerintah eksekutif dan legislatif diharapkan dalam melakukan aktivitas politik dan menjalankan tugasnya sebagai pejabat pemerintah daerah Kota Pontianak, hendaknya senantiasa selalu mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu, dalam hal ini kepentingan yang telah menjadi agenda program kerja yang sudah dicanangkan sebelumnya, dan kepada pemerintah eksekutif dan legislatif diharapkan untuk tetap bisa menanamkan rasa saling menghargai sesama warganegara tanpa ada lagi mendiskriminasikan suku, etnis, ras, agama, atau kelompok tertentu.
2. Kepada masyarakat etnis Tionghoa diharapkan tetap menjaga rasa cinta tanah air atau rasa kebangsaan dengan senganap kemampuan diri yang dimiliki. Selain itu diharapkan kepada masyarakat etnis Tionghoa untuk lebih toleran dan mau bekerjasama dengan tidak membeda-bedakan kelompok tertentu.
3. Kepada para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, terutama para pengembang kurikulum pendidikan nasional hendaknya direkomendasikan untuk merespon tentang pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda demi terwujudnya warganegara yang mempunyai pemahaman, pengetahuan, dan lebih melek politik, sehingga bisa lebih memposisikan dirinya sebagai warganegara di dalam sistem politik yang ada, hal ini sedana dengan realitas yang disemangati oleh rasa kebangsaan atau nasionalisme.
4. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan tersebut direkomendasikan untuk secara spesifik mengkaji dan menelaah masalah-masalah mengenai orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa dalam penguatan komitmen kebangsaan sebagai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis pendidikan politik bagi generasi muda, hal ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada guru atau dosen untuk mencoba mengimplementasikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap pentingnya pendidikan politik etik bagi generasi muda, ini yang merupakan model yang tepat untuk menjawab tantangan pendidikan sekarang ini dengan melihat pada kondisi perkembangan politik bangsa kita.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Almod dan Verba. 1990. *Budaya Politik; Tingkah Laku politik Dan Demokrasi Di Lima negara*. Bumi Aksara.
- Bakry Noor Ms. 2006. *Pendidikan Kewarga negaraan (Kewiraan)* Liberty Yogyakarta.

- Budi Rahman Selasa, 27 Januari 2009 : Stop Pertanyakan Nasionalisme Tionghoa. [8 Maret 2010].
- Budiono Kusumohamidjojo. 1994. *Pendidikan Wawasan Kebangsaan; Tantangan Dan Dinamika Perjuangan Kaum Cendekiawan Indonesia*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Idup Suhady dan Sinaga. 2003. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara- Republik Indonesia.
- Ihsan Bakri. A. 2009. *Etika Dan Logika Berpolitik; Wacana Kritis Atas Etika Politik, Kekuasaan, Dan Demokrasi*. Rosda.
- Justian Suhandinata. 2009. *WNI Keturunan Tionghoa Dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra. 2008. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*.
- Leo Agustino. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Lincoln, Yvonnas. & Egon, G. Guba. 1985. *Naturalistik Inquiry*. Beverly Hills: sagepublications.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Miriam Budiarjo. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moleong, Lexy J.. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oomen.T.K. 2009. *Kewarganegaraan Kebangsaan & Etnisitas; Mendamaikan Persaingan Identitas*. Kreasi Wacana.
- Taufik Abdullah. 2001. *Nasionalisme & Sejarah, Bandung: Satya Historika*.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. tentang *Kewarganegaraan Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. tentang *Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*.

**Artikel:**

Achmanto Mendatu. "Etnik Dan Etnisitas". Tersedia Newer Post Older Post Home *Powered by Blogger & Blog*. Di akses [6 Maret 2010].

Aritonang. M. "Memantapkan Partisipasi masyarakat sebagai pilar *Good Governace* Dalam Pembangunan". Di akses [14 Juli 2010].

Eka Hendry Ar, *Peran Politik Orang Tionghoa Kalimantan Barat*. Update: Rabu, 22 April 2009 17:16 Oleh admin Eka Hendry Ar. Hak Cipta (2008) STAIN Pontianak Kalimantan Barat. Di akses [6 Maret 2010].

Suryaditana, E.N Arifin dan A.Ananta. (2003). "Etnik Tionghoa, Pribumi Indonesia Dan Kemajemukan: Peran Negara, Sejarah, dan Budaya dalam Hubungan antar Etnis (*Institute of Southeast Asian Studies*)". Di akses [2 Maret 2010].

Perhimpunan INTI Superblok Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lantai 10 Jl. Angkasa Kav. B6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta 10610, IndonesiaTelp. (021) 2664-6828; 2664-6829.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Fax. (021) 2664-6597 Tersedia Email: [intidpp@cbn.net.id](mailto:intidpp@cbn.net.id). Di askes [3 Agustus 2010].